



LKJIP

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2025

DIBUAT OLEH :

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Sriwijaya No 40 Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perjanjian kinerja pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dalam kurun waktu satu tahun dalam pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan, kritik dan saran sangat kami harapkan. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai acuan dalam mengoptimalkan kinerja aparatur dan pada akhirnya berimbas terhadap kinerja Instansi Pemerintah kota Pekalongan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Pekalongan, 25 Februari 2026

Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan



YOS ROSYIDI, S.IP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660516 198603 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP2KB) Kota Pekalongan Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja DINSOSP2KB Tahun 2025. DINSOSP2KB pada tahun 2025 memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan total 3 (tiga) indikator kinerja, dan 3 (tiga) target kinerja yang harus dicapai.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di DINSOSP2KB pada tahun 2025 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan DINSOSP2KB ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan DINSOSP2KB Tahun 2025.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) DINSOSP2KB , adalah sebagai berikut:

1. Indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 74,90.
Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2025 nilai SAKIP DINSOSP2KB sebesar 76,35 dengan predikat A. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 101,94%.
2. Indikator Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan target yang ditetapkan 5,00%
Dari hasil perhitungan persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu dengan cara jumlah PPKS yang belum ditangani pada tahun N – 1 dikurangi jumlah PPKS yang belum ditangani pada tahun N dibagi jumlah PPKS di tahun N-1 dikalikan 100 persen diperoleh nilai 5,76 %. Sehingga capaian untuk indikator Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebesar 115,18 %.
3. Indikator Persentase Pencapaian Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) target yang ditetapkan 67,60 %.
Perhitungan Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) diperoleh dengan cara menghitung jumlah peserta KB aktif dibagi pasangan usia subur (PUS) dikali 100 persen

diperoleh nilai 64.41%. Sehingga capaian untuk Indikator Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) sebesar 95.27%.

Kinerja keuangan DINSOSP2KB Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp10.620.630.933,-. atau 93,96% dari total pagu anggaran sebesar Rp11.303.173.000,-.

Kendala yang dihadapi :

1. Koordinasi dan kerja sama dengan OPD terkait belum optimal;
2. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur masih terbatas;
3. Monitoring dan evaluasi perencanaan serta pengelolaan anggaran belum efektif;
4. Kapasitas aparatur bidang organisasi, ketatalaksanaan, dan perencanaan anggaran berbasis kinerja masih lemah.

Langkah kedepan :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama Tim dengan OPD terkait dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur; dengan mengikuti diklat / bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan, strategi pencapaian SPM;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan penggunaan anggaran sehingga menjadi lebih efisien;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur bidang organisasi, ketatalaksanaan dan pengembangan perencanaan / pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
KATA PENGANTAR	II
IKHTISAR EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI	V
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	2
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3 KONDISI APARATUR	12
1.4 SARANA DAN PRASARANA	13
1.5 ISU STRATEGIS	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026	18
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 – 2026	22
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 PENGUKURAN KINERJA	26
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	29
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	46
3.4 PRESTASI YANG DIRAIH	50
3.5 INOVASI	52
BAB IV PENUTUP	53
LAMPIRAN	56
IKU PERUBAHAN 2021-2026	56
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, dan dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, maka tugas dan fungsi terkait urusan Sosial dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi tanggungjawab Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan.

1.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinsos

P2KB Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi perlindungan dan jaminan sosial, bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

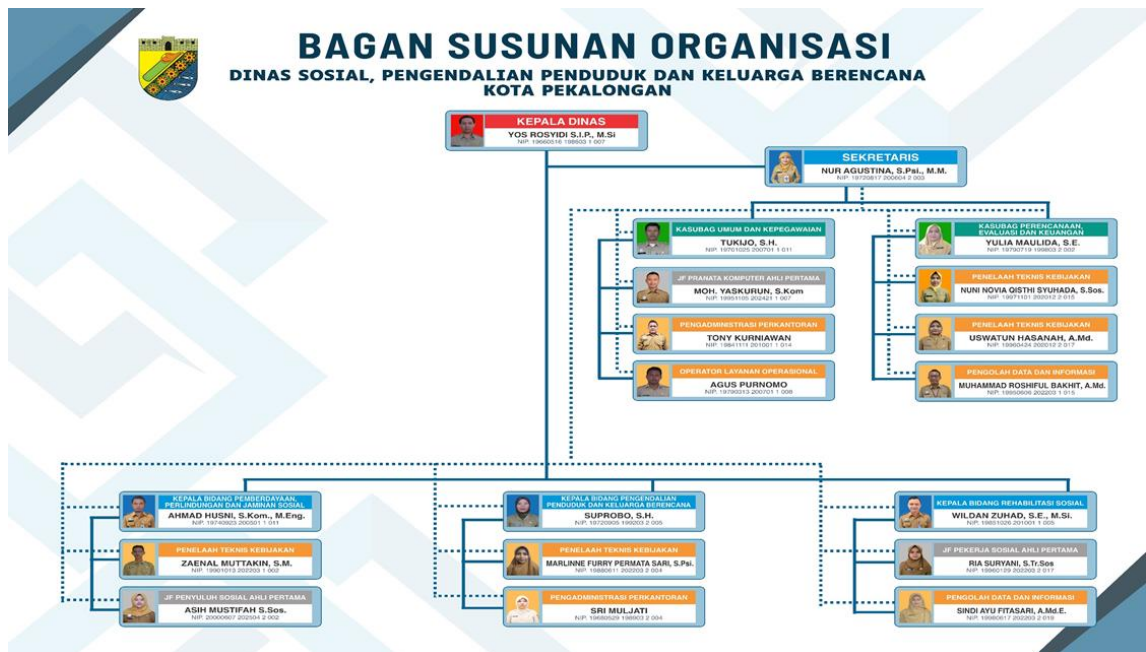
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Perumusan dan penetapan sasaran, program urusan sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- c. Pengekoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- d. Pengekoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
- e. Pengekoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. Pengekoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang rehabilitasi sosial;
- g. Pengarahan dan pengekoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standard Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- h. Pengekoordinasian Pengendalian, Pengawasan, Pembinaan, Pengevaluasian, Dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Dan Pelaksanaan Tugas; Dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.2.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :



Eselonering jabatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------------------------------------------|---|--------------|
| a. Kepala Dinas | = | Eselon II.b |
| b. Sekretaris | = | Eselon III.a |
| c. Kabid Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial | = | Eselon III.b |
| d. Kabid Rehabilitasi Sosial | = | Eselon III.b |
| e. Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | = | Eselon III.b |
| f. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan | = | Eselon IV.a |
| g. Kasubag Umum dan Kepegawaian | = | Eselon IV.a |

Secara lebih rinci tugas pokok dan fungsi dari masing- masing pejabat tersebut diatas diatur dalam Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 69 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan sebagai berikut :

1. Kepala Dinsos P2KB

Tugas pokok :

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

Fungsi :

- a. perumusan dan penetapan sasaran, program urusan sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang rehabilitasi sosial
- g. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standard Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya
- h. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

2. Sekretariat

2.1) Sekretaris

Tugas Pokok :

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Fungsi :

- a. perumusan sasaran, program, dan kegiatan dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan dinas;
- c. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;

- d. pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- e. pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan, dan kearsipan;
- f. pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan bidang keuangan;
- g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi
- h. pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standard Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang sosial per semester;
- j. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standard Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standard Pelayanan (SP);
- k. pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Evaluasi Jabatan (EVJAB)
- l. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya

2.2) Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- b. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
- d. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
- e. melaksanakan verifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
- f. melaksanakan fungsi akuntansi;

- g. menyusun bahan dan pengoordinasian laporan keuangan;
- h. menyusun bahan profil perangkat daerah;
- i. mengelola data dan informasi;
- j. menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- k. menyusun laporan hasil penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang sosial;
- l. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan

2.3) Kasubag Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;
- c. melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
- d. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- e. mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan
- f. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

3. Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial

3.1) Kabid Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tugas pokok :

Menyelenggarakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial.

Fungsi :

- a. perumusan program kerja bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;

- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
- d. pengoordinasian pengumpulan sumbangan dalam daerah;
- e. pengoordinasian pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah;
- f. pemeliharaan taman makam pahlawan di daerah;
- g. pengoordinasian pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah;
- h. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan pengevaluasian Standard Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- i. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

4.1) Kabid Rehabilitasi Sosial

Tugas Pokok :

Menyelenggarakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial.

Fungsi :

- a. perumusan program kerja bidang rehabilitasi sosial;
 - b. perumusan bahan kebijakan bidang rehabilitasi sosial;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial;
 - d. pengoordinasian pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
 - e. penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial;
 - f. penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya, bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial;
 - g. penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
 - h. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - i. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
-

- j. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

5.1) Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tugas Pokok :

Menyelenggarakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Fungsi :

- a. perumusan program kerja bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. penyelenggaraan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. penyelenggaraan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
- f. penyelenggaraan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
- g. pengoordinasian pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- h. penyelenggaraan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, serta pelaksanaan pelayanan KB;
- i. penyelenggaraan pemberdayaan dan peningkatan peran, serta organisasi kemasyarakatan tingkat kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
- j. penyelenggaraan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- k. penyelenggaraan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- l. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- m. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok :

memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

6.1) JF Pekerja Sosial Ahli Muda

JF Pekerja Sosial Ahli Muda mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisa dan evaluasi hasil kegiatan peninjauan awal dan koordinasi persiapan sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. Menganalisa dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap individu, keluarga, kelompok sasaran, masyarakat luas, dan pihak berpengaruh
- c. menganalisa dan evaluasi instrumen identifikasi awal dan seleksi
- d. mengevaluasi kegiatan identifikasi awal dan seleksi calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- e. menganalisa dan evaluasi penentuan kelayakan calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan;
- f. menganalisa dan evaluasi instrumen asesmen masalah, kebutuhan, dan sistem sumber;

- g. melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang rehabilitasi sosial serta menganalisa dan evaluasi kegiatan pemberian layanan penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang rehabilitasi sosial
- h. menganalisa dan evaluasi dokumen hasil kegiatan temu bahas hasil kegiatan intervensi;
- i. menganalisa dan evaluasi instrumen instrumen bimbingan dan pembinaan lanjut;
- j. menganalisa dan evaluasi hasil kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut dalam keluarga, masyarakat, dan pihak lainnya;
- k. menganalisa materi bimbingan dan pembinaan lanjut.

6.2) JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana

JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun kebutuhan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana
- b. menyusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
- c. melakukan analisis pemanfaatan data program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
- d. melakukan monitoring penyelenggaraan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
- f. melakukan analisis ketersediaan data sarana penunjang pelayanan KB;
- g. melakukan Promosi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi:
- h. melakukan sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga;
- i. melakukan sub kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPk melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang;
- j. melakukan sub kegiatan Pengelolaan operasional dan sarana di Balai penyuluhan KKBPk;

- k. melakukan sub kegiatan Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
- l. melakukan sub kegiatan Dukungan operasional pelayanan KB bergerak;
- m. melakukan sub kegiatan Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS).

1.3 KONDISI APARATUR

A. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan didukung oleh Sumber Daya Manusia ASN sebanyak 77 orang terdiri dari laki laki 47 orang dan perempuan 30 orang. Komposisi SDM Dinsos P2KB Kota Pekalongan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3. Komposisi SDM ASN DINSOS P2KB Tahun 2025

NO.	URAIAN	JUMLAH TAHUN 2025	
1.	Jumlah ASN		
	a. PNS	18	Orang
	b. PPPK	1	Orang
	c. PPPK PWKT	58	Orang
2.	Kualifikasi Pendidikan		
	a. Pasca Sarjana (S2)	4	Orang
	b. Sarjana (S1)	27	Orang
	c. Ahli Madya (DIII)	10	Orang
	d. SLTA	31	Orang
	e. SLTP	2	Orang
	f. SD	3	Orang
3.	Jenis Kelamin		
	a. Laki laki	47	Orang
	b. Perempuan	30	Orang
4.	Pangkat dan Golongan		
	a. Golongan IV	5	Orang
	b. Golongan III	9	Orang
	c. Golongan II	4	Orang
	d. Golongan I	0	Orang
	e. Golongan 9 (PPPK)	19	Orang
	f. Golongan 7	7	Orang
	g. Golongan 5	29	Orang
	h. Golongan 4	1	Orang
	i. Golongan 1	3	Orang

1.4 SARANA DAN PRASARANA

NO	URAIAN		JUMLAH BARANG	NILAI BUKU
A	ASET TETAP		1.122	13.543.178.474
1	TANAH		11	2.285.825.500
	1	TANAH	11	2.285.825.500
2	PERALATAN DAN MESIN		1.070	825.919.808
	1	alat besar	3	1.233.034
	2	alat angkutan	68	526.178.933
	3	alat bengkel dan alat ukur	1	1.167.700
	4	alat pertanian	-	-
	5	alat kantor dan rumah tangga	400	157.187.886
	6	alat studio, komunikasi dan pemancar	127	4.554.668
	7	alat kedokteran dan kesehatan	102	5.133.316
	8	alat laboratorium	142	3.074.128
	9	alat persenjataan	-	-
	10	komputer	227	127.390.143
	11	alat eksplorasi	-	-
	12	alat pengeboran	-	-
	13	alat produksi, pengolahan dan pemurnian	-	-
	14	alat bantu eksplorasi	-	-
	15	alat keselamatan kerja	-	-
	16	alat peraga	-	-
	17	peralatan proses/produksi	-	-
	18	rambu - rambu	-	-
	19	peralatan olah raga	-	-
3	GEDUNG DAN BANGUNAN		28	9.864.540.467
	1	bangunan gedung	26	8.794.259.235
	2	monumen	2	1.070.281.232
	3	bangunan menara	-	-
	4	tugu titik kontrol/pasti	-	-
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		12	117.004.199
	1	jalan dan jembatan	2	16.984.592
	2	bangunan air	1	977.795
	3	instalasi	-	-
	4	jaringan	9	99.041.812
5	ASET TETAP LAINNYA		-	-
	1	bahan perpustakaan	-	-
	2	barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga	-	-
	3	hewan	-	-
	4	biota perairan	-	-
	5	tanaman	-	-
	6	barang koleksi non budaya	-	-

NO	URAIAN	JUMLAH BARANG	NILAI BUKU
7	aset tetap dalam renovasi	-	-
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1	449.888.500
1	konstruksi dalam pengerjaan	1	449.888.500
P	PROPERTI INVESTASI	-	-
1	tanah (pi)	-	-
2	peralatan dan mesin (pi)	-	-
3	bangunan (pi)	-	-
4	jalan, irigasi dan jaringan (pi)	-	-
5	aset tetap lainnya (pi)	-	-
B	ASET LAINNYA	124	1.400.098
1	KEMITRAAN PIHAK KE-3	-	-
2	ASET TIDAK BERWUJUD	4	-
3	ASET LAIN-LAIN (RB)	120	1.400.098
4	ASET LAIN-LAIN (Dimanfaatkan pihak lain)		
5	ASET LAIN-LAIN (Lainnya-Hilang/Tidak ditemukan)		
6	ASET NON AKTIF	-	-
	Gabungan (A+B)	1.246	13.544.578.572
C	ekstrakomtabel	326	148.881.283
1	PERALATAN DAN MESIN	325	135.381.283
1	alat besar	-	-
2	alat angkutan	-	-
3	alat bengkel dan alat ukur	-	-
4	alat pertanian	-	-
5	alat kantor dan rumah tangga	266	110.260.971
6	alat studio, komunikasi dan pemancar	1	350.000
7	alat kedokteran dan kesehatan	-	-
8	alat laboratorium	58	24.770.312
9	alat persenjataan	-	-
10	komputer	-	-
11	alat eksplorasi	-	-
12	alat pengeboran	-	-
13	alat produksi, pengolahan dan pemurnian	-	-
14	alat bantu eksplorasi	-	-
15	alat keselamatan kerja	-	-
16	alat peraga	-	-
17	peralatan proses/produksi	-	-
18	rambu - rambu	-	-
19	peralatan olah raga	-	-
2	GEDUNG DAN BANGUNAN	1	13.500.000
1	bangunan gedung	1	13.500.000
2	monumen	-	-
3	bangunan menara	-	-

NO	URAIAN	JUMLAH BARANG	NILAI BUKU
4	tugu titik kontrol/pasti	-	-
3	ASET TETAP LAINNYA	-	-
1	bahan perpustakaan	-	-
2	barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga	-	-
3	hewan	-	-
4	biota perairan	-	-
5	tanaman	-	-
6	barang koleksi non budaya	-	-
7	aset tetap dalam renovasi	-	-
D	INVENTARIS GABUNGAN (A+B+C)	1.572	13.693.459.855

1.5 ISU STRATEGIS

Berangkat dari analisis lingkungan strategis dan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Pekalongan melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola.

Tabel T-B 35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelayanan publik	Belum optimalnya sistem pelayanan publik	Belum optimalnya implementasi SOP Pelayanan Publik dalam mendukung capaian kinerja
		Tidak optimalnya dukungan administrasi perkantoran
		Kurang optimalnya dukungan ketercukupan Sarpras Aparatur.
	Belum optimalnya kinerja organisasi	Belum optimalnya penyusunan perencanaan program dan kegiatan.
		Belum optimalnya penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
		Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
		Belum optimalnya keterbukaan informasi pelayanan publik

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Penanganan Kemiskinan	Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta menurunnya jumlah PPKS	Belum optimalnya keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial
		Belum optimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
		Belum optimalnya pelayanan sosial bagi PPKS(penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial/(gelandangan dan pengemis)
		Masih rendahnya graduasi KPM PKH
		Belum optimalnya database kemiskinan
		Belum optimalnya pemeliharaan sarpras pada Taman Makam Pahlawan
masih tingginya angka TFR (Total Fertility Rate)	Belum optimalnya pencapaian peserta KB Aktif	Belum Optimalnya pendataan/updating data keluarga
		Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun masih tinggi
		Masih rendahnya peserta KB MKJP
		Belum optimalnya peran serta organisasi masyarakat tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Dari urusan yang menjadi tugas dan fungsi pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, baik itu urusan sosial maupun urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana ada berbagai permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Belum optimalnya sistem pelayanan publik.
2. Belum optimalnya kinerja organisasi
3. Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta menurunnya jumlah PPKS
4. Belum optimalnya pencapaian peserta KB aktif

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP DINSOSP2KB Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan dokumen Renstra DINSOSP2KB Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu

dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/ *deployment/cascading* dari program serta tugas dan fungsi DINSOSP2KB .

Tabel 2.1. Matriks Perencanaan Kinerja pada
DINSOSP2KB Tahun 2025

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
VISI : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius		
Misi Ke-7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government		
Tujuan Kota : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	6,23 persen
Tujuan DINSOSP2KB 1 : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,67
Sasaran DINSOSP2KB 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	74,90
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
Misi Ke-1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat		
Tujuan DINSOSP2KB 2 : Meningkatkan Penanganan Kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	3,00 persen
Sasaran DINSOSP2KB 2 : Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	5,00 persen
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75,00 persen
Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	10 persen
Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	75 persen
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	100 persen
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	3,82 persen

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
Sosial		
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	53,73 persen
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase graduasi KPM PKH	10 persen
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 persen
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100 persen
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 persen
Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	100 persen
Tujuan DINSOSP2KB 3 : Menurunkan angka Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total) (IKK Outcome)	2.19 persen
Sasaran DINSOSP2KB 3 : Meningkatkan kepesertaan KB Aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67.60 persen
Program Pengendalian Penduduk	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100 persen
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 persen
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	12.00 persen
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (IKK Output)	8.24 perseribu
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20.60 persen
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Unmeet need KB	13 persen
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab utama DINSOSP2KB disajikan pada Tabel 2.2.1

Tabel 2.2.1

Target Sasaran Kinerja DINSOSP2KB Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Inspektorat
2	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana alam dan Sosial serta Menurunnya jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	Jumlah PPKS yang akan diturunkan adalah Jumlah PPKS tahun terakhir dikalikan target penurunan	DinsosP2KB
3	Meningkatnya kepesertaan KB Aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/MCPR)	Persen	(Jumlah peserta KB aktif / pasangan usia subur) x 100%	DinsosP2KB

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama DINSOSP2KB sebagaimana telah dicantumkan dalam perencanaan strategis dan disajikan pada Tabel 2.2.2

Tabel 2.2.2
Target Sasaran Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Pekalongan
Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2025	2025	2026
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Indeks	70	71,50	73,00	74,65	74,90	75,15
2.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana alam dan Sosial serta Menurunnya jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	3,21	3,32	3,43	4,00	5,00	5,00
3.	Meningkatnya kepesertaan KB Aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/MCPR)	persen	67,40	67,45	67,50	67,55	67,60	67,65

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

No	Tujuan Strategis	Indikator	2025	
			Satuan	Target
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	80,67
2	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	3,00
3	Menurunkan angka Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total) (IKK Outcome)	persen	2,16
No	Sasaran Strategis	Indikator	2025	
			Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP OPD	indeks	74,90
2	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	5,00
3	Meningkatnya kepesertaan KB aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence)	persen	67,65

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.752.490.000	APBD
Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 465.136.000	APBD
Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.754.791.000	APBD
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp. 1.268.700.000	APBD
Program Penanganan Bencana	Rp. 390.592.000	APBD
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 109.054.000	APBD
Program Pengendalian Penduduk	Rp. 205.380.000	APBN/APBD
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 1.742.610.000	APBN/APBD
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Rp. 1.614.420.000	APBN/APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :

- Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya

Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

- **Arahan Operasional**
Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.
- **Akuntabilitas**
Membantu untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.
- **Perencanaan**
Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.
- **Pengelolaan**
Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.
- **Penganggaran**
Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.
- **Penyediaan pelayanan kepada pihak luar**
Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.
- **Pengawasan Kerja**
Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	74,90	76,35	101,94	Sangat Berhasil
2	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	5,00	5,76	115,18	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya kepesertaan KB aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	67,60	64,40	95,27	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 1 target;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 104,13% dengan kategori sangat tinggi/sangat berhasil

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				Ket
				2022	2023	2024	2025	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	71,75	74,40	75,90	76,35	▲
2.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	18,39	17,64	16,68	5,76	▼
3.	Meningkatnya kepesertaan KB aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	64,27	61,46	64,41	64,40	▼

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	76,35	77,50	98,51	Sangat Berhasil
2.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	5,76	3,82	150,78	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya kepesertaan KB aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	64,40	67,65	95,19	Sangat Berhasil

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Provinsi/Nasional/Internasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Provinsi/Nasional/Internasional	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	76,35	85,20	89,61	Berhasil
2.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	5,76	-	-	-
3.	Meningkatnya kepesertaan KB aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	64,40	66,70	96,55	Sangat Berhasil

3.2.2. Capaian Kinerja Tujuan

Adapun kesimpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80.67	93.49	115,89	Sangat Berhasil
2.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	Persen	3.00	4.86	162,05	Sangat Berhasil
3.	Menurunkan angka Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Persen	2.16	2.19	101,58	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 3 target;
- 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 target;
- 3) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 126,51% dengan kategori Sangat Berhasil.

3.2.3. Analisis Capaian Kinerja

SASARAN 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP OPD	68,46	Indeks	74,40	75,90	74,90	76,35	101,94	77,50

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2025. Hasil evaluasi AKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan memperoleh nilai 76,35 atau predikat "BB". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Capaian evaluasi AKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan ini melebihi target nilai SAKIP nasional tahun 2025, dimana KemenPAN RB mendorong instansi pemerintah mencapai predikat minimal "BB" (Sangat Baik) hingga "A" (Memuaskan). Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.40 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,80
2	Pengukuran Kinerja	30	22,50
3	Pelaporan Kinerja	15	12,30

No	Daerah	Bobot	Nilai
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	18,75
Nilai Hasil Evaluasi		100	76,35
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Predikat)		BB	

Tabel 3.17. Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2025
1.	Bapperida	88,70
2.	DLH	85,95
3.	Dindagkop-UKM	85,70
4.	Inspektorat Daerah	84,75
5.	BPKAD	84,60
6.	BKPSDM	84,00
7.	DPMPPA	83,55
8.	Dinkominfo	83,50
9.	DKP	83,27
10.	Dinkes	83,25
11.	DPUPR	83,05
12.	Dindukcapil	82,95
13.	Setda	81,85
14.	Dindik	78,50
15.	Dinparbudpora	78,15
16.	DPMPTSP	78,00
17.	Kec. Selatan	77,15
18.	Dinhub	77,00
19.	Kec. Utara	76,65
20.	Kec. Barat	76,50
21.	Kec. Timur	76,45
22.	Dinperpa	76,40

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2025
23.	Dinsos P2KB	76,35
24.	Dinarpus	76,10
25.	BPBD	76,00
26.	Satpol P3KP	75,50
27.	Dinperinaker	75,45
28.	Set DPRD	75,00
29.	Dinperkim	74,80
30.	Bakesbangpol	73,75

Analisis keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan SAKIP;
2. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;
3. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.640.000	24.270.000	24.199.000	Kegiatan ini terdiri dari penyusunan dokumen perencanaan, dokumen RKA-SKPD dan laporan akuntabilitas kinerja yang menjadi komponen dalam evaluasi AKIP Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.610.150.000	2.591.426.000	2.336.701.050	Kegiatan administrasi keuangan, diperoleh laporan keuangan dan dokumen penatausahaan keuangan SKPD sebagai akuntabilitas keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	0	0	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang hanya melaksanakan kegiatan tahunan dalam festival di Kota Pekalongan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	291.258.000	324.445.000	324.127.456	Salah satu aktivitas dalam kegiatan ini adalah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebagai sarana pembahasan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.321.000	317.832.000	316.569.098	Kegiatan ini mendukung capaian nilai SAKIP OPD karena penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran mendukung kelancaran pekerjaan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	456.670.000	494.517.000	494.186.204	Kegiatan ini mendukung capaian nilai SAKIP OPD karena pemeliharaan sarpras mendukung kelancaran pekerjaan

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran: Rp 24.270.000 - Realisasi Anggaran: Rp 24.199.000 (99,71%) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 0,29 % yang berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyesuaian anggaran makan minum rapat b. Penyesuaian anggaran perjalanan dinas dalam kota 	Pengaturan pembagian kerja dan koordinasi yang efektif memungkinkan kegiatan terlaksana secara efisien tanpa penambahan kebutuhan pegawai	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran: Rp 2.591.426.000 - Realisasi Anggaran: Rp 2.336.701.050 (90,17% %) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 9,83 % yang berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyesuaian anggaran makan minum rapat b. Penyesuaian anggaran Gaji dan Tunjangan ASN 	Pengoptimalan sumber daya manusia yang tersedia melalui pembagian tugas sesuai tugas dan fungsi, serta didukung pemanfaatan aplikasi SIPD. Integrasi proses penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan tersebut memungkinkan kegiatan terlaksana secara efektif dan efisien	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran: Rp 0 - Realisasi Anggaran: Rp 0 (0 %) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 100 % yang berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyesuaian anggaran terkait <i>refocusing</i> dan efisiensi. 		Pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ada efisiensi tingkat kota
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran: Rp 324.445.000 - Realisasi Anggaran: Rp 324.127.456 (99,90 %) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 0,10 % yang berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyesuaian anggaran terkait belanja bahan cetak dan pengadaan b. Penghematan belanja ATK dan belanja modal 	Pengoptimalan sumber daya manusia yang tersedia melalui pembagian tugas sesuai tugas dan fungsi serta peningkatan koordinasi antar unit kerja. Dukungan penerapan sistem administrasi dan tata naskah dinas memungkinkan kegiatan berjalan efektif dan efisien	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran: Rp 317.832.000 - Realisasi Anggaran: Rp 316.569.098 (99,60 %) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 0,40 % yang berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyesuaian anggaran terkait belanja habis pakai 	Pemanfaatan tenaga penunjang secara terkoordinasi mendukung kelancaran pelayanan administrasi dan operasional perangkat daerah secara efektif dan efisien	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Kesimpulan efisiensi :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Penghematan anggaran 6,84%
2. Optimalnya produktivitas SDM
3. Penyelesaian kegiatan tepat waktu

Efisiensi ini memungkinkan cakupan diperluas tanpa penambahan biaya signifikan.

SASARAN 2 : Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS

Capaian indikator sasaran Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	n/a	Persen	17,64	16,68	5,00	5,76	115,18	3,82

Indikator Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.

Nilai Indikator sasaran 2 diperoleh dari Jumlah PPKS pada tahun N-1 dikurangi Jumlah PPKS pada tahun N dibagi Jumlah PPKS di tahun N-1 dikalikan 100 persen. Jumlah PPKS tahun 2025 yang dilayani yaitu bansos lansia 637 orang, bansos disabilitas sebanyak 229 orang, Kelayan RPSBM = 90 orang, Pemberian alat bantu 13 buah, PPKS DT Jateng 40 orang, Jumlah kelayan terlantar sebanyak 166 orang; Total keseluruhan 1.175 orang sedangkan Target Penurunan ditahun 2025 20.402

orang. Dengan demikian dapat diperoleh nilai sasaran 2 sebesar 5,76%.

Pada indikator sasaran 2 Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), DINSOSP2KB mempunyai target pada tahun 2025 sebesar 5,00% dan terealisasi sebesar 5,76% atau dengan capaian sebesar 115,18%.

Keberhasilan dalam mencapai target indikator sasaran didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Penganggaran yang tepat untuk penanganan PPKS
- b. Upaya komitmen antara pemangku kepentingan untuk upaya penurunan PPKS
- c. Verifikasi dan validasi dalam penanganan PPKS

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

1. Program Pemberdayaan Sosial.

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	450.000.000	420.000.000	365.000.000	Kegiatan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT) seperti Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT berkontribusi langsung pada indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	208.372.000	299.688.000	291.617.277	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota seperti Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota; Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota; Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota berkontribusi langsung pada indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	- Anggaran: Rp 165.448.000 - Realisasi Anggaran: Rp 164.508.915 (99,43%) Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 0,57% yang berasal dari: a. Penyesuaian perjalanan dinas dalam kota maupun banpot b. Beberapa pekerjaan hanya pemberian gaji kepada Tenaga Kegiatan	Efisiensi SDM meningkat karena petugas KUBE lebih banyak dilapangan untuk mengetahui dan membina kelompok usaha.	Pembagian jadwal yang lebih terbuka dan efisien dalam durasi kunjungan ke Kelompok Usaha.
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	- Anggaran: Rp 299.688.000 - Realisasi Anggaran: Rp 291.617.277 (97,31%) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 2,69% yang berasal dari: - Penyesuaian perjalanan dinas dalam kota maupun banpot	Efisien SDM dikarenakan adanya jalin komunikasi antara OPD dengan pihak lain seperti LKS, LKKS, TKSK dan lainnya	Penyederhanaan pertemuan yang dijadikan lebih singkat sehingga bisa lebih efisien.

Kesimpulan efisiensi: Program Pemberdayaan Sosial berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Penghematan anggaran 0,57% - 2,69%
2. Optimalnya produktivitas SDM
3. Penyelesaian kegiatan tepat waktu dan efisien dalam penyelenggaraan kegiatan

2. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.189.082.000	1.185.403.000	1.177.572.669	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial seperti Penyediaan Permakanan; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial; dan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar berkontribusi langsung pada indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	571.410.000	569.388.000	533.764.693	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial seperti Penyediaan Permakanan; Penyediaan Alat Bantu; Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA; Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak; Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga berkontribusi langsung pada indikator Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
				lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	- Anggaran: Rp 1.185.403.000 - Realisasi Anggaran: Rp 1.177.572.669 (99,34%) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 0,66% yang berasal dari: a. Penyesuaian dalam cetak penggandaan	Efisiensi SDM meningkat karena pengoptimalan dalam tugas dan fungsi yang sesuai dalam hal ini SDM banyak ditempatkan dalam Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM)	Tidak ada efisiensi waktu yang signifikan dikarenakan dikerjakan sesuai SOP dan jam kerja yang sudah berpengalaman.
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	- Anggaran: Rp 569.388.000 - Realisasi Anggaran: Rp 533.764.693 (93,74%) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 6,26% yang berasal dari: a. Penyesuaian jumlah penerima jadup lansia dan disabilitas b. Penyesuaian harga pada bantuan alat bantu c. Penyesuaian peserta pada legalitas pernikahan.	Efisiensi SDM meningkat karena pengoptimalan dalam tugas dan fungsi yang sesuai.	Tidak ada efisiensi waktu yang signifikan dikarenakan dikerjakan sesuai SOP dan jam kerja yang sudah berpengalaman.

Kesimpulan efisiensi Program Pemberdayaan Sosial berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Penghematan anggaran 0,66% - 6,26%
2. Optimalnya produktivitas SDM
3. Penyelesaian kegiatan tepat waktu dan efisien dalam penyelenggaraan kegiatan

3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.492.520.000	1.268.700.000	1.238.191.982	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota seperti Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota; dan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga berkontribusi langsung pada indikator Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-

masing kegiatan pada Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran: Rp 1.268.700.000 - Realisasi Anggaran: Rp 1.238.191.982 (97,60%) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 2,40% yang berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyesuaian penerima bansos dhuafa dan penyesuaian harga paket sembako b. Beberapa anggaran perjalanan dinas dalam kota yang tidak dilaksanakan 	Efisiensi SDM meningkat karena pengoptimalan dalam tugas dan fungsi yang sesuai	Tidak ada efisiensi waktu yang signifikan dikarenakan dikerjakan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Kesimpulan efisiensi Program Pemberdayaan Sosial berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Penghematan anggaran 2,40%
2. Optimalnya produktivitas SDM yang bekerja tepat waktu
3. Penghematan dikarenakan penyesuaian harga paket sembako yang ada di e-katalog

4. Program Penanganan Bencana

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	345.250.000	390.592.000	282.705.491	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota seperti Penyediaan Makanan; Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan; dan Pelayanan Dukungan Psikososial berkontribusi langsung pada indikator Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penanganan Bencana

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran: Rp 390.592.000 - Realisasi Anggaran: Rp 282.705.491 (72,38%) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 27,22% yang berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan anggaran untuk kebencanaan 	Efisiensi SDM meningkat karena pengoptimalan dalam tugas dan fungsi yang sesuai	Tidak ada efisiensi waktu yang signifikan dikarenakan dikerjakan sesuai waktu yang telah ditentukan.

	tidak terserap semuanya dikarenakan hanya terjadi bencana pada bulan januari.		
--	-------------------------------------------------------------------------------	--	--

Kesimpulan efisiensi Program Penanganan Bencana berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Penghematan anggaran 27,22%
2. Optimalnya produktivitas SDM yang bekerja tepat waktu
3. Penghematan dikarenakan penggunaan anggaran untuk bencana

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	102.910.000	109.054.000	106.390.748	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota seperti Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota berkontribusi langsung pada indikator Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran: Rp 109.054.000 - Realisasi Anggaran: Rp106.390.748 (97,56%) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 2,44% yang berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyesuaian belanja cetak dan penggandaan; b. Penyesuaian belanja bahan baku bangunan dan peralatan kebersihan untuk pemeliharaan TMP 	Efisiensi SDM meningkat karena pengoptimalan dalam tugas dan fungsi yang sesuai	Tidak ada efisiensi waktu yang signifikan dikarenakan dikerjakan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Kesimpulan efisiensi Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Penghematan anggaran 2,44%
2. Optimalnya produktivitas SDM yang bekerja tepat waktu
3. Penghematan dalam belanja bahan pemeliharaan untuk Taman Makam Pahlawan

SASARAN 3 : Meningkatnya Kepesertaan KB aktif

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Kepesertaan KB aktif adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67,35	Persen	61,46	64,41	67,60	64,40	95,27	67,65

Nilai indikator sasaran 3 diperoleh dari jumlah peserta KB aktif dibagi pasangan usia subur (PUS) dikali 100%. Jumlah peserta KB aktif tahun 2024 sejumlah 27.429 dan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) tahun 2024 sejumlah 42.664. Sehingga dapat dihitung nilai indikator sasaran 3 sebesar 64,41.

Pada indikator sasaran 3 Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR), DINSOSP2KB mempunyai target pada tahun 2024 sebesar 67,55 % dan terealisasi sebesar 64,41 % atau dengan capaian sebesar 95,35 % dan belum memenuhi target yang ditetapkan. Angka ini lebih tinggi daripada target mCPR yang ditetapkan oleh BKKBN. BKKBN menargetkan mCPR pada Kota Pekalongan sebesar 57.10%.

Faktor penghambat dalam pencapaian target indikator sasaran 3 dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:

- Kurangnya pengetahuan tentang jenis kontrasepsi yang tersedia dan cara penggunaannya.
- Stigma terhadap penggunaan kontrasepsi atau ketakutan akan reaksi masyarakat
- Pengaruh ketidaksetaraan gender dalam pengambilan keputusan tentang perencanaan keluarga.

Upaya yang sudah dilakukan untuk menaikkan nilai mCPR antara lain :

- Sosialisasi, penyuluhan dan informasi tentang manfaat dan jenis kontrasepsi modern
- Edukasi terutama untuk remaja mengenai kesehatan reproduksi dan dampak

- keluarga berencana
- Melibatkan tokoh masyarakat, agama dan kelompok komunitas untuk mendukung program keluarga berencana.
 - Mengkampanyekan kesadaran tentang pentingnya keluarga berencana melalui media massa dan platform online.
 - Menggunakan data untuk mengevaluasi keberhasilan dan membuat penyesuaian sesuai kebutuhan.

6. Program Pengendalian Penduduk.

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	205.380.000	205.380.000	198.647.210	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota seperti Penyediaan Data dan Informasi Keluarga; Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga; Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB berkontribusi langsung pada indikator Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Pengendalian Penduduk

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran: Rp205.380.000 - Realisasi Anggaran: Rp198.647.210 (96,72%) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 3,28% yang berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyesuaian pelayanan pada faskes yang melayani pelayanan KB b. Beberapa kegiatan melaksanakan efisiensi cetak dan pengadaan. 	Efisiensi SDM meningkat karena pengoptimalan dalam tugas dan fungsi yang sesuai serta dibantu oleh penyuluh KB	Tidak ada efisiensi waktu yang signifikan dikarenakan dikerjakan sesuai waktu dan SOP yang telah ditentukan.

Kesimpulan efisiensi Program Pengendalian Penduduk berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

- Penghematan anggaran 3,28%
- Optimalnya produktivitas SDM yang bekerja tepat waktu
- Pelayanan pada Faskes yang semula 52 faskes menjadi 50 faskes dikarenakan perencanaan dana DAK.

7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya lokal	899.576.000	899.576.000	873.888.161	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya lokal seperti Pengendalian Program KKBPK; Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana; Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok); Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang; Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja berkontribusi langsung pada indikator Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	847.034.000	843.034.000	646.506.069	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota seperti Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya; Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak berkontribusi langsung pada indikator Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Pembinaan Keluarga Berencana

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya lokal	- Anggaran: Rp899.576.000 - Realisasi Anggaran: Rp 873.888.161 (97,14%) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 2,86% yang berasal dari: a. Penyesuaian perjalanan dinas dalam kota maupun banpot b. Beberapa kegiatan melaksanakan efisiensi cetak dan penggandaan.	Efisiensi SDM meningkat karena pengoptimalan dalam tugas dan fungsi yang sesuai serta dibantu oleh penyuluh KB	Tidak ada efisiensi waktu yang signifikan dikarenakan dikerjakan sesuai waktu dan SOP yang telah ditentukan.
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	- Anggaran: Rp843.034.000 - Realisasi Anggaran: Rp 646.506.069 (76,69%) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 23,31% yang berasal dari: a. Pendistribusian alat kontrasepsi dijadwalkan sehari bisa mengampu minimal 2 tempat faskes b. Pelaksanaan MKJP sudah optimal sehingga ada efisien	Efisiensi SDM meningkat karena pengoptimalan dalam tugas dan fungsi yang sesuai serta dibantu oleh penyuluh KB	Tidak ada efisiensi waktu yang signifikan dikarenakan dikerjakan sesuai waktu dan SOP yang telah ditentukan.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
	dalam operasionalnya.		

Kesimpulan efisiensi Program Pembinaan Keluarga Berencana berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Penghematan anggaran 2,86-23,31%
2. Optimalnya produktivitas SDM yang bekerja tepat waktu
3. Pelayanan pada KB baik pada distribusi ALKON, Pelayanan MKJP dan sosialisasi Pelayanan KB sudah sesuai prosedur yang ditetapkan oleh ketentuan penggunaan dana DAK

8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.617.120.000	1.614.420.000	1.611.054.910	Kegiatan Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga seperti Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS); Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita); Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) berkontribusi langsung pada indikator Unmeet need KB

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran: Rp1.614.420.000 - Realisasi Anggaran: Rp1.611.054.910 (99,79%) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 0,21% yang berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyesuaian perjalanan dinas dalam kota maupun banpot b. Beberapa kegiatan melaksanakan efisiensi cetak dan penggandaan. 	Efisiensi SDM meningkat karena pengoptimalan dalam tugas dan fungsi yang sesuai serta dibantu oleh penyuluh KB	Tidak ada efisiensi waktu yang signifikan dikarenakan dikerjakan sesuai waktu dan SOP yang telah ditentukan.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Keluarga			

Kesimpulan efisiensi Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Penghematan anggaran 0,21%
2. Optimalnya produktivitas SDM yang bekerja tepat waktu
3. Pelayanan pada KB baik pada distribusi ALKON, Pelayanan MKJP dan sosialisasi Pelayanan KB sudah sesuai prosedur yang ditetapkan oleh ketentuan penggunaan dana DAK

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2025 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 11.303.173.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 10.620.630.933,- atau sebesar 93,96%. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp. 8.753.530.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.325.687.483,- atau sebesar 95,11%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

No	Urusan/Program/kegiatan/sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp.)	%
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7.740.763.000	7.290.534.583	94,18%
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.752.490.000	3.495.782.808	93,16%
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.270.000	24.199.000	99,71%
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan	8.140.000	8.114.000	99,68%

No	Urusan/Program/kegiatan/sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp.)	%
	Perangkat Daerah			
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.830.000	3.830.000	100,00%
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.300.000	12.255.000	99,63%
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.591.426.000	2.336.701.050	90,17%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.549.643.000	2.294.943.450	90,01%
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.300.000	39.299.600	100,00%
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.483.000	2.458.000	98,99%
11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	324.445.000	324.127.456	99,90%
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.300.000	7.300.000	100,00%
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134.404.000	134.116.615	99,79%
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.110.000	4.105.936	99,90%
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.918.000	88.913.500	99,99%
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.480.000	5.474.000	99,89%
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000	990.000	99,00%
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.233.000	83.227.405	99,99%
21	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317.832.000	316.569.098	99,60%
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.760.000	1.759.200	99,95%
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	148.100.000	147.835.053	99,82%
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	167.972.000	166.974.845	99,41%
25	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	494.517.000	494.186.204	99,93%
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	234.567.000	234.428.954	99,94%
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	225.000.000	224.821.750	99,92%
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.950.000	34.935.500	99,96%
29	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	465.136.000	456.126.192	98,06%
30	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	165.448.000	164.508.915	99,43%
31	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	165.448.000	164.508.915	99,43%
32	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	299.688.000	291.617.277	97,31%
33	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	41.240.000	40.690.000	98,67%
34	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga	100.968.000	93.972.277	93,07%

No	Urusan/Program/kegiatan/sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp.)	%
	Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota			
35	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	157.480.000	156.955.000	99,67%
36	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.754.791.000	1.711.337.362	97,52%
37	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.185.403.000	1.177.572.669	99,34%
38	Penyediaan Permakanan	494.556.000	493.914.426	99,87%
39	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	669.780.000	662.799.393	98,96%
40	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	21.067.000	20.858.850	99,01%
41	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	569.388.000	533.764.693	93,74%
42	Penyediaan Permakanan	427.060.000	398.202.000	93,24%
43	Penyediaan Alat Bantu	29.490.000	28.806.994	97,68%
44	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	12.260.000	12.183.800	99,38%
45	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	50.550.000	44.663.635	88,36%
46	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	50.028.000	49.908.264	99,76%
47	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.268.700.000	1.238.191.982	97,60%
48	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.268.700.000	1.238.191.982	97,60%
49	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	417.210.000	407.304.106	97,63%
50	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	851.490.000	830.887.876	97,58%
51	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	390.592.000	282.705.491	72,38%
52	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	390.592.000	282.705.491	72,38%
53	Penyediaan Makanan	339.882.000	231.995.491	68,26%
54	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	37.500.000	37.500.000	100,00%
55	Pelayanan Dukungan Psikososial	13.210.000	13.210.000	100,00%
56	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	109.054.000	106.390.748	97,56%
57	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	109.054.000	106.390.748	97,56%
58	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	109.054.000	106.390.748	97,56%
59	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.562.410.000	3.330.096.350	93,48%
60	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	205.380.000	198.647.210	96,72%
61	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	205.380.000	198.647.210	96,72%

No	Urusan/Program/kegiatan/sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp.)	%
62	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	54.480.000	52.843.678	97,00%
63	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	122.100.000	119.700.000	98,03%
64	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	28.800.000	26.103.532	90,64%
65	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.742.610.000	1.520.394.230	87,25%
66	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya lokal	899.576.000	873.888.161	97,14%
67	Pengendalian Program KKBPK	486.456.000	462.713.233	95,12%
68	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	96.800.000	96.800.000	100,00%
69	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	83.120.000	83.120.000	100,00%
70	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	109.300.000	107.384.928	98,25%
71	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	123.900.000	123.870.000	99,98%
72	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	843.034.000	646.506.069	76,69%
73	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	78.500.000	44.750.000	57,01%
74	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	517.624.000	367.625.000	71,02%
75	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	246.910.000	234.131.069	94,82%
76	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.614.420.000	1.611.054.910	99,79%
77	Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.614.420.000	1.611.054.910	99,79%
78	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	127.620.000	124.254.910	97,36%
79	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	708.000.000	708.000.000	100,00%
80	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	778.800.000	778.800.000	100,00%

No	Urusan/Program/kegiatan/sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp.)	%
Jumlah		11.303.173.000	10.620.630.933	93,96%

3.4 PRESTASI YANG DIRAIH

1. Juara 3 Rumah Dataku Kampung KB Urip Rejo Kelurahan Kuripan Yosorejo tingkat Provinsi Jawa Tengah.



2. Juara Harapan 1 Kategori Kota sebagai Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) terbaik tingkat Nasional Tahun 2025. DinsosP2KB selaku pendamping dan memberikan bimbingan kepada Kelompok Utama Mandiri

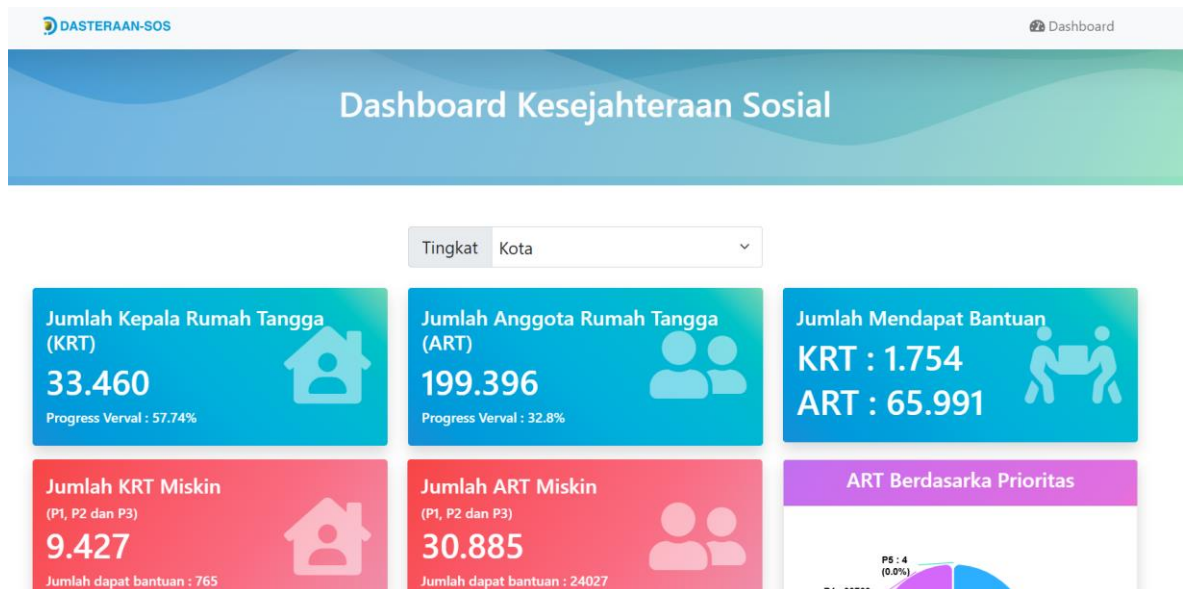


3. Juara 3 Rumah Dataku Kampung KB Urip Rejo Kelurahan Kuripan Yosorejo tingkat Provinsi Jawa Tengah.



3.5 INOVASI

1. DASHBOARD KESEJAHTERAAN SOSIAL (DASTERAAN-SOS) Inovasi Digital Untuk Transparansi dan Akurasi Data



DASHBOARD KESEJAHTERAAN SOSIAL (DASTERAAN-SOS) Inovasi Digital Untuk Transparansi dan Akurasi Data

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2025 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan ketercapaian 101,94 % yaitu indikator Nilai SAKIP OPD dengan target 74,90 dan realisasi sebesar 76,35;
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator yaitu persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan ketercapaian nilai 115,18 %, dengan target 5,00 %, dan realisasi 5,76 %;
3. Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator yaitu Persentase pencapaian pemakaian alat kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) ketercapaian nilai 95,27 %, dengan target 67,60% dan realisasi sebesar 64.40%.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Rp. 11.303.173.000,- Dari pagu anggaran yang ada tersebut realisasi anggaran mencapai Rp 10.620.630.933,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 93,96%.

Sehingga dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut dengan anggaran sebesar Rp. 11.303.173.000,- telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kota Pekalongan serta Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan adalah 93,96% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan perlu lebih dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian visi dan Misi Kota Pekalongan.

Berdasarkan hasil realisasi kinerja sasaran dan keuangan dan dibandingkan target kinerja Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa DinsosP2KB Kota Pekalongan mencapai efisien dalam mengelola anggaran dalam mewujudkan target kinerja sasaran. Hal ini berdasarkan hasil realisasi capaian kinerja sebesar 104,13%, sedangkan realisasi anggaran sebesar 93,96%, sehingga diperoleh efisiensi sebesar 10,82%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan kepada pihak - pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun kota Pekalongan.

Untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan serta langkah ke depan sebagai upaya meningkatkan kinerja guna mencapai visi dan misi Kepala Daerah 2021-2026 yang

telah ditetapkan, maka beberapa strategi peningkatan kinerja yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi perlindungan dan jaminan social dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk lebih dilaksanakan secara optimal.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama Tim dengan OPD terkait dalam rangka pencapaian kinerja.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dengan mengikuti diklat atau bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan.
4. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan penggunaan anggaran sehingga lebih efisien.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur bidang organisasi, ketatalaksanaan dan pengembangan perencanaan atau pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Pekalongan, 25 Februari 2026

Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Pekalongan



YOS ROSYIDI, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660516 198603 1 007

LAMPIRAN

IKU PERUBAHAN 2021-2026

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU PERUBAHAN)
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Tipe Indikator	Kondisi Awal	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	70,00	70,00	71,50	73,00	74,65	74,90	75,15	Inspektorat Daerah	Dinsos P2KB
2	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta menurunnya jumlah PPKS	Persentase penurunan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Persen	Jumlah PPKS yang belum ditangani pada Tahun N dikurangi Jumlah PPKS yang belum ditangani pada Tahun N-1 dibagi jumlah PPKS yang belum ditangani pada Tahun N-1 dikali 100 %	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 100	3,21	3,21	3,43	4,00	5,00	5,00	5,00	Dinsos P2KB	Bidang Dayalinjamsos dan Rehabilitasi
3	Meningkatnya kepesertaan KB Aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate / MCPR</i>)	Persen	Jumlah peserta KB aktif dibagi pasangan usia subur dikali 100 %	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 100	67,40	67,40	67,45	67,50	67,55	67,60	67,65	Dinsos P2KB	Bidang P2KB

Pekalongan, 9 Desember 2024
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kota Pekalongan



YOS ROSYIDI, S.I.P., M.Si
NIP. 19660516 198603 1 007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YOS ROSYIDI, S.I.P., M.Si.**

Jabatan : **Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.**

Jabatan : **Wali Kota Pekalongan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Wali Kota Pekalongan

**Kepala Dinas Sosial, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana**



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE., M.M.

YOS ROSYIDI, S.I.P., M.Si.

NIP. 19660516 198603 1 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
Tujuan :				
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	89,88	Formulasi : IKM tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bag. Organisasi
2.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	3,00	Formulasi : Angka terbanyak Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinsos P2KB
3.	Menurunkan angka Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total) (IKK Outcome)	2,156	Formulasi : Total Fertility Rate tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinsos P2KB
Sasaran Strategis :				
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	74,90	Formulasi : Nilai SAKIP tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
				Sumber data : Inspektorat
2.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	5,00	Formulasi : Selisih PPKS yg blm ditangani sampai dengan tahun N dibagi Jumlah PPKS Th N-1 dikali 100% % Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinsos P2KB
3.	Meningkatnya kepesertaan KB Aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Rate/mCPR)	67,6	Formulasi : Jumlah peserta KB aktif dibagi Pasangan Usia Subur x 100% Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinsos P2KB

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 3.728.080.000,-	APBD
2. Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 399.096.000,-	APBD
3. Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.754.791.000,-	
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp. 1.364.150.000,-	APBD

5. Program Penanganan Bencana	Rp.	340.592.000,-	APBD
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp.	109.054.000,-	APBD
7. Program Pengendalian Penduduk	Rp.	205.380.000,-	APBD
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.	1.742.610.000,-	APBD
9. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp.	1.614.420.000,-	APBD

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Wali Kota Pekalongan



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE., M.M.

Pihak Pertama,

**Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana**



YOS ROSYIDI, S.I.P., M.Si.

NIP. 19660516 198603 1 007